

BAB I

1.1 Latar Belakang

Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke negara asing yang bertujuan untuk melibatkan diri mereka dengan kegiatan, perencanaan, maupun aksi konflik bersenjata atau pelatihan terorisme di negara yang dituju, dasar utama atas mengapa suatu individu atau kelompok ini menjalani aksi-aksi tersebut Sebagian besar berasal dari ideologi yang mereka anut, baik itu berasal dari kemauan diri ataupun dari pengaruh faktor luar (Yunanto,2017). Melihat belakangan ini terdapat eskalasi terhadap kemunculan ideologi atau pemikiran yang memiliki pengaruh kuat dan bersifat radikal, ini memunculkan berbagai potensi masalah bagi Indonesia sendiri. Beberapa kasus yang sudah pernah terjadi menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terdapat cukup banyak jumlah rakyat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk menjadi jihadis, disana mereka bergabung dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) untuk menerima pelatihan dan melibatkan diri mereka dengan mengikuti berbagai konflik bersenjata yang terjadi di Suriah (Ramdani,2020).

Perjalanan ke Suriah diakibatkan adanya kebangkitan ISIS yang merupakan suatu kelompok militan yang memiliki tujuan untuk membentuk negara islam (Wilson Center,2019). Kelompok ini sebelumnya merupakan suatu kelompok dari *Al-Qaeda*, yang kemudian pada tahun 2004 Abu Musab al-Zarqawi mendirikan kelompok militant Islamic States ini, namun kelompok ini sempat menghilang tanpa jejak sampai pada tahun 2011 dimana mereka kembali muncul dengan

memanfaatkan ketidakstabilan yang terjadi di Iraq dan Syria untuk melancarkan serangan sekaligus memperkuat pasukan mereka. Pada tahun 2013, kelompok ini mengubah namanya menjadi ISIS. Selama masa aktifnya kelompok ini dari tahun 2014 sampai kejatuhannya di tahun 2019, ISIS telah melakukan berbagai operasi militer untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya dan juga mempengaruhi berbagai warga negara asing, untuk membuat mereka agar bergabung kedalam perjuangan ISIS (Wilson Center, 2019).

Menurut mantan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar (2022) “Jumlah jihadis asal Indonesia pada periode 2014 hingga 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.600 orang. Namun, dari jumlah tersebut, namun hanya sekitar 344 orang yang tercatat kembali ke Indonesia pada kurun waktu itu. Kemudian, terdapat laporan lanjutan pada tahun 2022, dimana dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa terdapat sekitar 847 *jihadis* berkewarganegaraan Indonesia yang masih berada di zona konflik di Irak dan Suriah, dengan rincian 545 orang masih berada di zona konflik (*Foreign Terrorist Fighters*), 128 orang dilaporkan meninggal dunia, 174 orang telah kembali ke Indonesia (*returnees*), dan 556 orang menjadi deportan.” Kembalinya para *FTF* ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia, terutama karena adanya potensi penyebaran paham radikal di tengah masyarakat (KompasTv, 2022).

Melalui aksi yang dilakukan para pejuang teroris asing ini, dapat dikatakan bahwa motif utama nya adalah dari ideologi yang mereka pegang (Kustiwa & Harijanti, 2023). Berbagai pejuang teroris telah terpapar dengan ideologi yang bersifat radikal melalui beberapa cara seperti media, ajakan teman, atau dengan

kondisi hidup mereka yang tidak memungkinkan dan akhirnya dengan mudah terpapar dengan pengaruh ideologi ini. Beberapa individu atau kelompok yang mendapat ancaman untuk bergabung membela ideologi mereka ini sering terjadi terhadap kelompok anak muda atau kelompok rentan, dimana mereka dipaksa untuk membela suatu ideologi radikal secara paksa. Salah satu kasus pemaksaan yang dapat dijadikan contoh adalah bagaimana salah satu *returnee* Indonesia yaitu Febri Ramdani yang berangkat ke Suriah setelah ditarik dengan janji manis ISIS, Dimana disana dia dipaksa membantu ISIS namun pada akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia sebagai *returnee* (detiknews,2020).

Setelah ISIS jatuh pada awal tahun 2019, ISIS, telah kehilangan kekuatan kubu teritorial terakhirnya di Baghuz Fawqani, melalui pimpinan Pasukan Demokratik Suriah mendeklarasikan kemenangan akhir atas organisasi teroris secara resmi. Meskipun tidak ada wilayah resmi ISIS yang masih tersisa, diperkirakan di sana masih terdapat puluhan ribu simpatisan ISIS di Irak, dan juga masih terdapat beberapa warga negara asing yang masih terjebak di negara-negara medan pertempuran seperti di Irak dan Suriah, beberapa alasan mengapa mereka masih belum dapat kembali ke negara asal mereka adalah bagaimana, beberapa dari mereka masih menjadi simpatisan ISIS, dan tetap meluncurkan serangan-serangan kecil di beberapa kota Suriah dan Irak. Selain itu beberapa dari mereka juga ada yang ditempatkan di bekas tempat pengungsi di Suriah, Irak, dan Libya yang menjadi tempat penahanan bagi ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang sebelumnya berafiliasi dengan ISIS (BBC NEWS INDONESIA,2020).

Kondisi ini turut memengaruhi posisi Indonesia, mengingat masih adanya warga negara Indonesia yang berada di wilayah-wilayah tersebut, baik sebagai pendukung aktif maupun keluarga yang terasosiasi dengan ISIS. Setelah kekalahan ISIS, sebagian WNI tersebut menghadapi berbagai kendala untuk kembali, baik karena faktor keamanan, status hukum di negara setempat, maupun sikap politik negara asal. Situasi inilah yang kemudian memunculkan dinamika dan perdebatan di dalam negeri terkait kebijakan pemulangan mereka.

Fenomena kepulangan WNI *returnee* ISIS ini menuai perdebatan, antara yang mendukung (pro) dan yang menolak (kontra). Mereka yang mendukung kepulangan *returnee* seperti menurut Mardani Ali Sera dari anggota Partai Keadilan Sejahtera melalui wawancara dia berkata bahwa *returnee* masih tetap WNI dan harus dipulangkan secara rapi (Prastiwi,2020) , selain itu organisasi seperti INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*) telah melakukan pemetaan terhadap pemulangan wanita dan anak-anak *returnee eks-ISIS* (INFID,2020). Namun terdapat juga beberapa pihak yang masih tidak mendukung atau masih merasa sungkan terhadap kepulangan *returnee* ke Indonesia, seperti beberapa masyarakat umum yang masih merasa bahwa keberangkatan para *returnee* itu merupakan salah mereka sendiri (Adha & Yumitro,2024), dan ini juga dicerminkan dari bagaimana pemerintah Indonesia masih cukup sungkan dalam menerima *returnee* kembali, dalam rapat kabinet pada 11 Februari 2020 yang menghasilkan keputusan untuk tidak memulangkan beberapa *returnee* yang tidak memiliki identitas negara Indonesia seperti paspor ataupun mereka yang merupakan eks-kombatan (BBC Indonesia,2020).

Namun pemerintah masih berupaya untuk mencari solusi yang memiliki kemungkinan untuk mengembalikan para *returnee* ke Tanah Air namun dengan menjaga keamanan baik untuk masyarakat maupun nasional, upaya ini direalisasikan dengan program pengawasan terhadap para *returnee* ini untuk menjamin keamanan di masyarakat dan rehabilitasi untuk membantu para *returnee* agar bisa kembali ke masyarakat setelah melepas berbagai afiliasi dan pengaruh dari radikalisme, namun apakah program tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya ?

Melihat kebijakan yang masih amat samar terkait bagaimana seharusnya berjalannya perlakuan terhadap *returnee*, BNPT menggunakan program *soft approach* untuk upaya rehabilitasi para *returnee* (Ramdani,2020). Layanan yang diberikan menyangkut dimensi fisik melalui penyediaan kebutuhan pokok (makanan dan minuman, pakaian, dan shelter) dan kegiatan olahraga; dimensi psikologis yaitu katarsis, terapi kognitif; dimensi sosial/hubungan dengan masyarakat; dan nilai budaya (Kristiani & Rahayu,2020). Tujuannya adalah memulihkan kondisi *FTF* baik yang dideportasi maupun yang kembali dari wilayah konflik sehingga kembali mempunyai rasa percaya diri, motivasi, kemandirian, bisa beradaptasi dengan masyarakat dan kembali berfungsi secara sosial. Tentunya keberhasilan program rehabilitasi bergantung kepada aktor yang bersangkutan dan aktor-aktor ini memiliki peran masing-masing dalam tahapan yang berbeda dalam proses rehabilitasi. Program harus melibatkan pendekatan multidisiplin, menggambarkan dengan jelas peran penegakan hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam area khusus koordinasi dan kerja sama. Keluarga dan komunitas

terletak di jantung program rehabilitasi dan reintegrasi. Menyediakan lingkungan yang inklusif yang tidak mengucilkan tetapi lebih melibatkan mereka yang kembali dan mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan sehari-hari mungkin merupakan faktor kesuksesan Tunggal terbesar (Jawaid,2017).

Disini penulis akan berusaha untuk menganalisa kebijakan *soft approach* oleh BNPT terhadap *returnee* di Indonesia, dan dengan menggunakan indikator keberhasilan, penulis akan dapat mengetahui apakah program *soft approach* BNPT berjalan secara efektif untuk menangani para *returnee* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pembahasan dalam tulisan ini menekan pada:

“Bagaimana implementasi kebijakan *soft approach* BNPT terhadap *returnee* Suriah dan Irak di Indonesia, beserta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan indikator keberhasilan program BNPT ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap strategi *soft approach* oleh BNPT terhadap penanganan para *returnee* di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk melihat apakah kebijakan ini sudah berjalan secara efektif dalam menangani para *returnee* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni secara teoritis dan praktis yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis, terkhusus mengenai ilmu hubungan internasional dalam pembahasan kontraterorisme. Selanjutnya penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi serta bahan pembandingan bagi peneliti lain/selanjutnya terkait topik kontraterorisme dan ancaman dari radikalisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk berbagai pihak, seperti contohnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia melalui BNPT dalam meningkatkan kebijakan terhadap *FTF* di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pembaca atau pembuat kebijakan untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Pendekatan *soft approach*, yang digunakan oleh BNPT menjadi suatu kebijakan yang perlu analisa lebih lanjut terkait implementasi kebijakan *soft approach* BNPT terhadap *returnee* di Indonesia. Dalam suatu pengukuran efektivitas perlu adanya suatu indikator yang dipakai untuk mengukur efektivitas kebijakan, terdapat berbagai indikator yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu seperti penggunaan *Happiness Index tool* merupakan alat pengukur kesejahteraan rakyat untuk mengevaluasi inisiatif rehabilitasi bagi *returnee* di Distrik Swat, Pakistan (Rafiq, Hasssan dan Saeed, 2021). Penelitian ini melihat bahwa penggunaan alat indeks kebahagiaan sebagai indikator efektivitas kebijakan untuk membandingkan indeks kebahagiaan sebelum dan sesudah program rehabilitasi untuk *returnee* di Pakistan berlangsung, penelitian ini menemukan bahwa indeks kebahagiaan *returnee* mengalami peningkatan namun tidak signifikan.

Kemudian terdapat juga penelitian yang mengevaluasi efektivitas program reintegrasi non-kustodial terhadap kesejahteraan mantan pejuang teroris yang kembali di Mombasa, Kenya (Ngachra & Kimokoti, 2023). Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Melalui penelitian ini dapat melihat bagaimana proses reintegrasi non-kustodial ini kuat dan efektif, adanya kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas, memfasilitasi transisi kembali ke masyarakat bagi mantan pelaku ekstremisme kekerasan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka.

Penanganan mantan teroris radikal di Arab Saudi juga merupakan salah satu upaya negara penanganan *returnee*, program ini dijalankan untuk meluruskan kembali para *returnee* radikal kepada “Islam yang sejuk dan moderat” melalui pendekatan terpadu dalam tiga unsur utama yaitu: religius, psikologis, dan sosial/ekonomi (Pradana,2019). Program ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan karena angka *Non-Recidivism* atau jumlah pelaku yang sudah tidak melakukan aksi menyimpang yang mencapai 86% dalam jangka 10 tahun. Namun terdapat beberapa kritik terhadap program ini seperti bagaimana program ini tidak semudah itu untuk diaplikasikan di negara lain karena program ini menitik beratkan esensi religi Islami dan program ini tidak terlalu transparan terhadap angka keberhasilan murni dan kasus-kasus tidak mendapat transparansi jelas.

Terdapat juga penelitian yang membahas mengenai alasan yang melandasi kebijakan pemerintah Indonesia menolak memulangkan warga WNI mantan anggota ISIS dari zona konflik di Suriah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder, studi ini menganalisis berbagai faktor seperti pertimbangan risiko keamanan nasional, hak asasi manusia, serta kemungkinan statelessness jika *returnees* tidak dipulangkan. Ditemukan bahwa penolakan tersebut diputuskan demi melindungi masyarakat luas dan menjaga stabilitas nasional, sekaligus mempertimbangkan perlunya proses peradilan yang adil apabila *returnees* melakukan tindakan kriminal (Anns & Syauqillah, 2023).

Studi terakhir yang merupakan studi yang mengevaluasi hambatan BNPT saat menyusun dan mengimplementasikan program deradikalisasi khusus untuk perempuan *returnee* ISIS, bekerja sama dengan Sentra Handayani. Ditemukan isu seperti rendahnya pemahaman terhadap dimensi gender, indikator deradikalisasi yang belum mencapai perubahan psikologis mendalam, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Rekomendasinya mencakup pengembangan pendekatan gender-sensitive, pemberdayaan perempuan, dan harmonisasi kebijakan serta infrastruktur program BNPT (Eddyono,2022).

Melalui penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa program penanganan *FTFs* ataupun *returnee* sudah dilaksanakan di negara lain dengan berbagai hasil, baik itu memuaskan atau kurang, dimana peneliti mencoba untuk menganalisa program-program tersebut untuk menentukan indikator implementasi program tersebut, dan terdapat juga beberapa penelitian yang melihat bagaimana penanganan para *returnee* ini di Indonesia. Menggunakan berbagai indikator penelitian untuk menentukan efektivitas program seperti penggunaan *Happiness Index tool* atau penggunaan metode campuran untuk melihat efektivitas program tersebut.

Namun *state of the art* dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana program *soft approach* BNPT di Indonesia di implementasikan dengan menggunakan indikator yang belum digunakan sebagai indikator keberhasilan program dalam penelitian terdahulu, yaitu penggunaan *Social Integration Model* untuk mengindikasikan implementasi kebijakan BNPT.

1.5.3 Kerangka Teori

1.5.3.1 Social Integration Model

Social Integration Model menekankan bahwa reintegrasi bukan berarti seseorang harus sepenuhnya meninggalkan ideologi, tapi yang penting adalah menghentikan keterlibatan dalam kekerasan (Horgan,2009). Dalam bukunya Horgan yang berjudul “*Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*”, terdapat 3 tahap dalam reintegrasi suatu individu atau kelompok ke dalam masyarakat yaitu:

1. *disengagement* (Meninggalkan Kekerasan)

Disengagement disini dimaksudkan bagaimana suatu individu maupun kelompok sudah berhenti secara fisik dari aktivitas teroris atau kekerasan, tanpa keharusan langsung untuk meninggalkan ideologi atau keyakinan radikal. Menurut Horgan, ini adalah langkah awal yang penting, karena orang bisa berhenti bertindak dulu sebelum (atau tanpa pernah) berubah cara berpikir (Horgan,2009).

2. *reinsertion* (Kembali ke Masyarakat)

Reinsertion adalah bagian proses dimana individu maupun kelompok mulai bertransisi kembali ke masyarakat secara praktis, yang menyediakan kondisi minimum agar orang dapat bertahan hidup setelah keluar dari kelompok. Disini *reinsertion* tidak sama dengan *reintegration* karena di tahap ini belum hadir penerimaan sosial secara penuh oleh sisi masyarakat, dan identitas baru belum terbentuk sepenuhnya.

3. *reintegration* (Berfungsi Secara Sosial dan Ekonomi).

Reintegration adalah proses akhir dan lebih dalam dan memiliki jangka panjang untuk membangun kembali identitas sosial positif di dalam masyarakat, sehingga mantan pelaku merasa menjadi bagian dari komunitas yang sah dan produktif. Menurut Horgan tanpa adanya *reintegration* yang baik, ada risiko *relapse/reengagement*, yaitu situasi dimana kembalinya individu atau kelompok ke jalan kekerasan dan terorisme hal ini dikarenakan suatu individu atau kelompok merasa terisolasi atau tidak diterima oleh masyarakat.

Model ini juga dapat disebut sebagai *Psychological Disengagement Model*. Dengan memenuhi 3 tahap tersebut baru dapat dikatakan bahwa seseorang telah berhasil diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan model ini sebagai model indikasi terhadap implementasi program rehabilitasi *returnee* terutama mereka yang kembali dari Suriah dan Irak selama berlangsungnya program *soft approach* BNPT sampai mereka dapat kembali terintegrasikan ke masyarakat.

1.5.3.2 Tabel Kerangka Teori

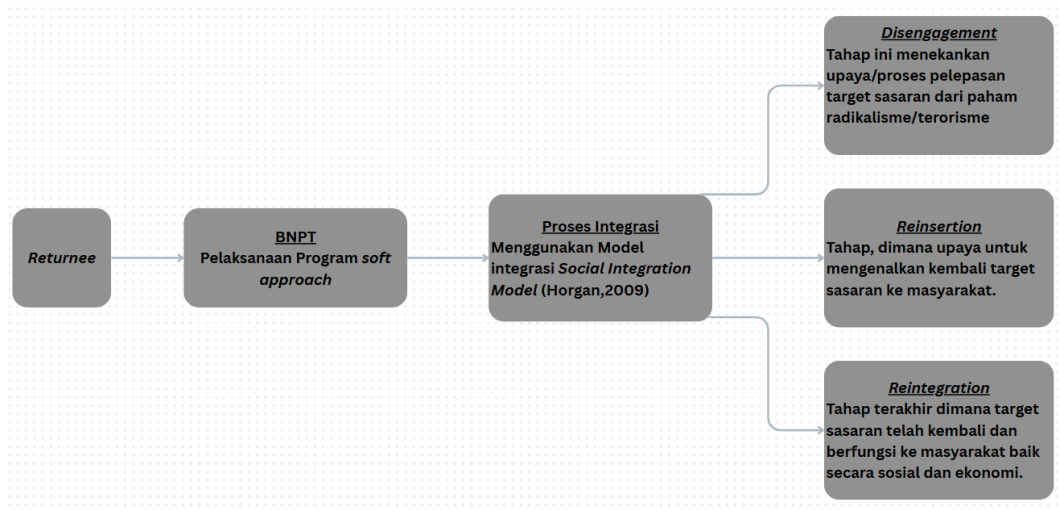


Table 1.1 Tabel Kerangka Teori

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Returnee

Individu yang sebelumnya telah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bergabung, mendukung, atau terlibat dalam aktivitas kelompok teroris atau organisasi radikal transnasional (dikenal sebagai *Foreign Terrorist Fighters*), kemudian kembali ke negara asalnya, baik secara sukarela, melalui deportasi, maupun repatriasi. *Returnee* seringkali membawa pengalaman, jaringan, dan ideologi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan baru bagi negara asal (Horgan, 2009).

1.6.1.2 *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*

Dalam resolusi 2178 dari *United Nations* (2014), mengartikan *FTFs* sebagai “individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka untuk tujuan tersebut perbuatan, perencanaan atau persiapan, atau partisipasi dalam, tindakan teroris atau penyediaan atau penerimaan teroris pelatihan, termasuk yang berkaitan dengan konflik bersenjata”, dan lebih lanjut mencatat bahwa *FTFs* meningkatkan intensitas, durasi, dan kompleksitas konflik dan dapat menimbulkan bahaya yang serius kepada Negara asal, transit, tujuan, serta zona konflik bersenjata yang berdekatan di mana mereka aktif.

1.6.1.3 *Soft approach*

Soft approach, merupakan suatu pendekatan yang bersifat lunak, guna untuk membuat suatu kebijakan lebih mudah diterima, penyebaran pendekatan lunak guna penanganan terorisme ini sebaiknya disebarkan dengan menyebarkan pesan-pesan perdamaian, moderasi dan toleransi untuk melawan konten kebencian dan narasi terorisme yang terus disebarkan teroris (Hakim,2020).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Returnee*

Returnee merupakan individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya telah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bergabung, mendukung, atau terlibat dalam aktivitas kelompok teroris atau organisasi

radikal transnasional dimana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan *returnee* ISIS di Suriah dan Irak dan kemudian kembali ke Indonesia, baik secara sukarela maupun melalui deportasi/repatriasi. Dalam penelitian ini *returnee* dapat berupa *Foreign Terrorist Fighter (FTFs)* atau Warga Indonesia yang secara paksa dibawa pergi ke luar negeri namun ciri utamanya adalah mereka kembali ke Indonesia baik secara sukarela, dideportasi, maupun melalui repatriasi dari program BNPT.

1.6.2.2 *Foreign Terrorist Fighters (FTFs)*

Foreign Terrorist Fighters (FTFs) dalam penelitian ini merupakan “individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka untuk tujuan tersebut perbuatan, perencanaan atau persiapan, atau partisipasi dalam, tindakan teroris atau penyediaan atau penerimaan teroris pelatihan, termasuk yang berkaitan dengan konflik bersenjata”, dan lebih lanjut mencatat bahwa *FTFs* meningkatkan intensitas, durasi, dan kompleksitas konflik dan dapat menimbulkan bahaya yang serius kepada Negara asal, transit, tujuan, serta zona konflik bersenjata yang berdekatan di mana mereka aktif. Dalam penelitian ini *FTFs* yang dimaksud adalah individu yang berafiliasi dengan ISIS

1.6.2.3 *Soft approach*

Dalam penelitian ini *soft approach*, merupakan suatu pendekatan yang bersifat lunak, pendekatan BNPT ini dilakukan untuk memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih

pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan *soft approach* yang dilakukan oleh BNPT. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana BNPT menggunakan program *soft approach* untuk melakukan deradikalisasi dan integrasi terhadap *returnee* terutama yang telah kembali dari Suriah atau Irak.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui metode ini penulis akan menganalisa data secara mendalam dan kemudian menghubungkannya dengan konsep yang akan digunakan. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2018) mendefinisikan kualitatif sebagai metode penelitian melalui pemanfaatan latar alamiah, dalam rangka menafsirkan fenomena yang terjadi melalui berbagai metode. Relevansi metode kualitatif dengan penelitian ini dikarenakan dapat memberikan pemahaman terkait keberlangsungan dan implementasi kebijakan *soft approach* oleh BNPT.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif di dalam menjelaskan pembahasan. Tipe deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena memberikan penjelasan bagaimana suatu kasus dapat terjadi. Dalam tipe deskriptif juga memberikan data dan fakta yang kredibel dengan kondisi yang tengah berlangsung.

1.7.3 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi sekitar Universitas Diponegoro, Semarang. Peneliti akan menjalankan risetnya di Semarang dikarenakan terdapat beberapa data yang akan digunakan di riset ini ditemukan melalui studi pustaka (buku, jurnal, dsb).

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah BNPT dan para *returnee* yang sudah menjalani program *soft approach* BNPT, terutama *returnee* Suriah yang terafiliasi dengan ISIS. Penelitian ini pada dasarnya akan membahas banyak terkait bagaimana implementasi dari kebijakan BNPT dalam menangani *returnee*, dan untuk mengintegrasikan para *returnee* kembali ke masyarakat.

1.7.5 Jenis Data

Jenis data yang akan diberikan pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan deskriptif. Numerik berarti penyajian data akan berbentuk angka yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan deskriptif akan menyajikan data yang berupa teks atau kata-kata yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut karena dapat memperkuat hasil analisa.

1.7.6 Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder. Sumber primer akan didapatkan langsung melalui

lembaga yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni BNPT. Kemudian sumber sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka dari jurnal, laporan, berita, buku, dsb. Penggunaan kedua sumber ini ditujukan agar dapat meningkatkan kredibilitas dari penelitian ini.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan memakai 2 pendekatan dalam pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data melalui sumber seperti jurnal, laporan, buku, dsb. Kemudian, wawancara digunakan agar bisa mendapatkan data atau informasi secara primer. Dimana narasumber yang akan diwawancarai adalah pihak BNPT.

1.7.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam melakukan analisis dan interpretasi data, peneliti menggunakan metode dari Miles & Huberman (1994). Penggambaran dari proses ini bisa dilihat melalui tabel berikut:

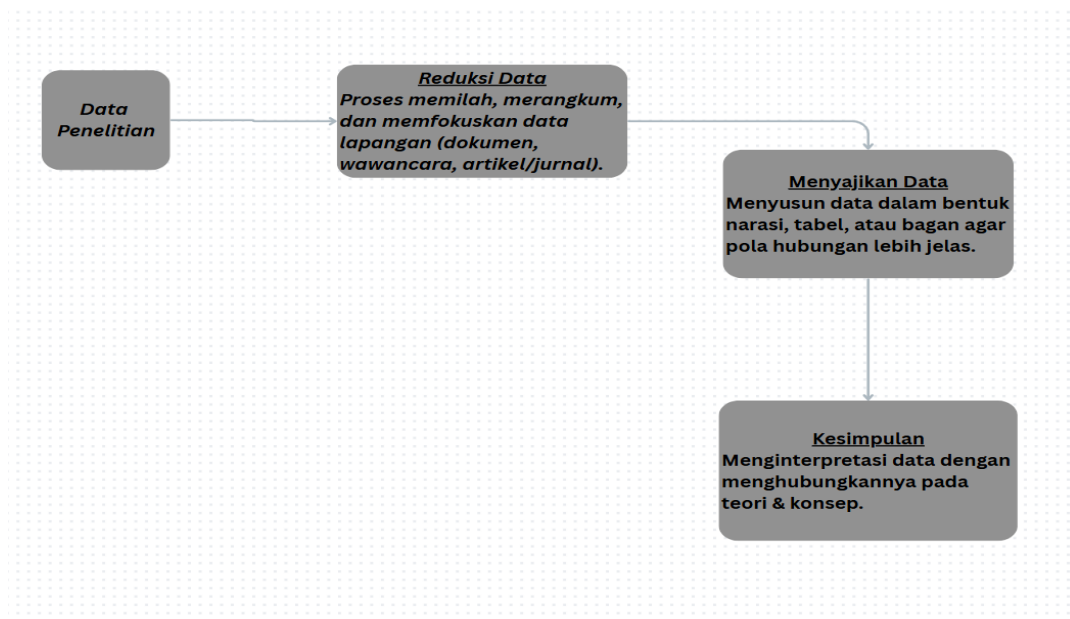


Table 1.1. Tabel Alur Analisa dan Interpretasi Data Penelitian

Metode ini memberikan tiga tahapan dalam menganalisis suatu peristiwa. Pertama, reduksi data. Tahapan ini mengarah ke proses menyeleksi, dan menyederhanakan data, kemudian membuat abstraksi serta transformasi dari kumpulan data yang telah didapat. Kedua, menyajikan data. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan data melalui berbagai bentuk penyajian, seperti menggunakan grafik, bagan, jaringan, dan matriks untuk memudahkan menarik kesimpulan. Ketiga, kesimpulan. Tahap ini merupakan bagian penarikan kesimpulan dari proses yang telah dilalui di tahap sebelumnya.